

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan bangsa Indonesia selama kurang lebih tujuh dasawarsa mengisi kemerdekaan ternyata sedang banyak dihadapkan dengan berbagai permasalahan krusial, seperti maraknya praktik korupsi, mafia anggaran, kemiskinan, intoleransi ras, kekerasan seksual, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut ternyata mengakibatkan dampak terhadap penghambatan proses keadaban bangsa kita, terutama dalam membangun kesadaran kolektif yang berlandaskan kepada moralitas.¹ Tak mengherankan, jika keadaban bangsa ini sedang dipertaruhkan dengan persoalan sosial-politik, ekonomi, dan agama.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas penduduknya menganut agama Islam, bisa kita lihat dari banyaknya pondok pesantren dan organisasi-organisasi kemasyarakatan berbasis Islam yang di dirikan oleh para kiai. Kiai sendiri merupakan sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam.² Beberapa istilah seperti bindere, nun, ajengan dan guru merupakan sebutan yang semula diperuntukan bagi para ulama tradisional di Jawa dan di luar

¹ Masmuni Mahatama, “*Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara*”, (Jurnal Mawa’izh, Vol.8, No.1, 2017), Hal.32

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 565.

Jawa, ini bisa disejajarkan dengan istilah kiai. Menurut Manfred Ziemek, penghormatan yang tinggi terhadap kiai ini juga sebagai hasil atas integritas para kiai terhadap godaan-godaan yang bermotif kepentingan diri untuk melakukan oportuniste politik. Dengan kedudukan tersebut peranan kiai tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, melainkan juga merambah pada bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan lainnya.³ Peranan kiai dalam bidang politik ini bisa dilihat dalam perjalanan sejarah bangsa ini di zaman kolonial, hingga sampai membentuk suatu wadah organisasi massa berbasis agama yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama (NU). Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan memberikan penjelasan yang komprehensif dalam bukunya yaitu Antologi NU tentang perkembangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik, sejak awal munculnya demokrasi dalam tata pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan.

NU didirikan oleh para kiai (ulama) pengasuh pondok pesantren (Ponpes) pada 31 Januari 1926 M atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Pendirian NU tersebut sebagai implementasi dari perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam para kiai Sunni. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan tentunya tidak meninggalkan tradisi keilmuan para kiai sebelumnya. Pada

³ Ali Maschan Moesa, 1999, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : Lepkiss, hlm 60.

awal berdirinya NU, secara murni bukan merupakan organisasi politik, bahkan tidak berafiliasi sama sekali terhadap partai politik (Parpol) tertentu. Tetapi pada perkembangan berikutnya, NU pernah bergabung dengan Parpol tertentu dan pernah menjadi organisasi politik menjelang Pemilu 1955.⁴

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sangat bertanggung jawab untuk ikut memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa. Sebab Nahdlatul Ulama dilahirkan tidak hanya ditujukan untuk golongannya saja. akan tetapi Nahdlatul Ulama juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama juga telah berusaha ikut serta dalam menawarkan gagasan dan jalan keadaban yang bisa diberikan kepada umat mau pun bangsa ini sedari awal kelahiran dan dinamika eksistensinya.

Pertama, NU telah berusaha membuat konsep *mabadi' khoiro ummat* (perinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai jawaban perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan moralitas tersebut bertumpu pada *as-shidq* (kejujuran) dan *amanah* (tanggung jawab). *Kedua*, dalam ranah keagamaan, NU juga telah berhasil merumuskan gagasan dasar tentang *tawassuth* (Moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan

⁴ *Ibid*, Hlm.3

i'tidal (adil). *Ketiga*, NU juga telah memelopori pengamalan pancasila sebagai asas negara dan bangsa yang bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Atas dasar itu NU sangat wajib menjaga dan melestarikan asas-asas dasar negara yang telah dirumuskan oleh para pendahulu, melalui perjuangan para alim ulama dan goresan pena para *syuhada*, selaku penerus para Nabi.⁵

Arti penting lain pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan yang selalu dijadikan cermin dan pondasi dasar perjuangan selama ini. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.⁶

Proses perjuangan dalam tubuh NU di negeri ini yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan keumatan sekaligus berjuang dalam kekuatan politik (*political power*) berbasis massa atau umat yang terus merekat dalam tubuh dan gerakan-gerakan kultural, nalar, dan aktualisasi spirit sosial kebangsaannya. Bahkan seorang tokoh Dawam Rahardjo berpendapat bahwa dalam kenyataan sejarah perkembangan politiknya, NU justru tidak menampilkan pemahaman politik

⁵ Amin Farih, "*Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*", (Jurnal penelitian sosial keagamaan UIN Walisongo, Vol.24, No.2, November 2016), Hal.256

⁶ Ibid.

yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosialnya, terlebih dalam menyangkut perilaku sosial politiknya.⁷

Jikalau NU dalam sejarahnya pernah ambil kiprah dalam gerakan politik, hal itu tidak lain adalah salah satu dinamika perjuangan kebangsaan dan kenegaraan dari tubuh NU sendiri. Hampir semua kiprah politik yang ada dalam tubuh NU, selalu dilandasi dengan *Ijtihad* politik berbasis *fiqih*, yang merupakan kerangka acuan pengambilan hukum dalam khazanah Islam. Kita juga bisa ambil beberapa contoh *Ijtihad* politik NU antara lain, seperti; Sikap yang non kooperatif terhadap penjajahan belanda, namun kooperatif saat penjajahan jepang, penetapan *dar al-Islam*⁸ pada wilayah Indonesia, Resolusi Jihad,⁹ dan masih banyak lagi.¹⁰

Dalam tataran historis maupun normatif ajaran, Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, bila

⁷ Asep Saeful Muhtadi, “*Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif*”, (jakarta: LP3ES, November 2004), Hal.xxiv

⁸ Imam Abu Hanifah berpendapat, suatu Negara disebut Dar Al-Islam apabila umat Islam merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka.

⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Resolusi adalah suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Sedangkan makna dari Jihad menurut KBBI adalah suatu usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan bersama. Martin Van Bruinessen dalam buku yang berjudul “NU: Tradisi, Relasi-relasi kuasa, dan pencarian wacana baru” (1994) mencatat, pada tanggal 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai Jihad (perang suci). Dalam pertemuan itu lahirlah Resolusi Jihad 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri.

¹⁰ Mustaqim Muhamad, “*Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi atas kiprah politik nahdlatul ulama*”, (jurnal ADDIN, Vol.9, No.2, Agustus 2015), Hal.335

keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata kehidupan manusia. Islam tidak hanya dijadikan sebagai “alat legitimasi” terhadap kekuasaan (*legitimate of power*). Politik yang dipahami secara keseluruhan dengan mengenyampingkan pengertian yang lebih luas dan lengkap, tentu akan mengaburkan makna dan menafikan kontribusi Islam terhadap dunia politik itu sendiri. Maka dari itu, Islam perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka paradigmatik yang bersifat dinamik dalam pemikiran politik.¹¹

Meminjam kerangka teori Elnerst Gellner, NU berdiri untuk membela praktis Islam yang cenderung dekat dengan *local Islam*. Dalam kitab *Qanun Asasi Li Jami'ati Nahdlatul Ulama*, K.H. Hasyim Asy'ari memperhatikan adanya gerakan keagamaan baru yang menyerukan pemberantasan bid'ah dengan ‘kedok’ kembali pada Al-Qur'an. Padahal, gerakan baru inilah yang sebenarnya memproduksi bidah.¹² Dari sini bisa disimpulkan, pendirian NU bukan untuk tujuan politik kekuasaan semata, melainkan politik kerakyatan (keagamaan). Maka bagi umat Islam Indonesia yang menginginkan pelaksanaan, peraktek dan pemikiran keagamaannya dekat dengan tradisi lokalnya, kehadiran NU dinilai memberi perlindungan. Bila ini bisa disebut tindakan

¹¹ Ridwan, “Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik”, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004), Hal.1-2

¹² Khamami Zada, “Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan”, (Jakarta, Kompas, 2010), Hal.4

politik kerakyatan dalam pengertian secara luas, maka politik jenis inilah yang patut disebut tingkatan politik tertinggi NU.

Seperti yang sudah disinggung di atas, perjuangan warga NU tidak hanya berhenti pasca kemerdekaan saja, namun keterlibatan dalam mempertahankan ideologi dan kebebasan juga dilakukan oleh warga NU. Selain melakukan gerakan-gerakan diplomasi, perlawanan secara fisik pun dilakukan kepada bangsa Jepang. Bahkan pada tanggal 10 November 1945 pun para tokoh NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah memutuskan fatwa resolusi jihad yang mendorong rakyat Surabaya ikut serta dalam Resolusi Jihad tersebut.¹³

Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Islam dan politik sebenarnya tidak bisa kita pisahkan secara kultural, dalam tubuh NU sendiri, politik adalah sebuah jalan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta penyebaran paham Islam yang berorientasi pada keadaban bangsa dan masyarakat. Maka dari itu penulis berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai peran politik Nahdlatul Ulama dalam berbangsa dan bernegara, karena selama perjalanannya, NU selalu menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara.

¹³ Yovenska L.Man, “*Urgensi Nahdlatul Ulama Dalam Pemerintahan Indonesia*”, (Jurnal Al-Imrah, Vol.3, No.2, 2018), Hal.147

Menurut peneliti, peran organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama sangat berpengaruh dan mempunyai kontribusi besar terhadap negara serta etika politik kebangsaan yang tumbuh dan berkembang dalam tubuh NU menjadi kekuatan primer gerakannya. Sehingga segala bentuk gerakan NU baik itu gerakan yang tertuju pada internal maupun eksternal selalu dilandasi dengan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman seperti *tawassuth* (Moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (adil).

Peneliti dalam hal ini akan lebih menitik beratkan pada pembahasan peran politik NU pada masa Orde Baru hingga awal Reformasi, tepatnya pada tahun 1994-2001. Maka, dari sini peneliti akan mengambil judul penelitiannya, yaitu **“Etika dan Peran Politik Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 1994-2001”**.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah di jelaskan, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana etika politik Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana peran politik Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1994-2001?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hubungannya dengan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui etika politik Nahdlatul Ulama.
2. Mengetahui peran politik Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1994-2001.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian mengenai peran politik Nahdlatul ulama Dalam berbangsa dan bernegara pada tahun 1994-2001. maka penulis mencari dan menelusuri sumber-sumber informasi yang relevan dengan judul di atas. adapun beberapa sumber yang terdahulu memberikan gambaran informasi dari masalah penelitian ini yang penulis ketahui diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saepulah, dengan tajuk “*Politik Identitas Keagamaan Warga Nahdlatul Ulama (NU)*”, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati). Penelitian ini menganalisis bagaimana peran organisasi kemasyarakatan khususnya Nahdlatul Ulama dalam peran politik identitas keagamaan yang selalu menjadi isu hangat dalam setiap momen politik Nasional maupun Daerah. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa politik identitas keagamaan setiap daerah berbeda-beda.

Warga NU secara kultural-keagamaan akan berbeda dengan massa NU secara politik. Peran dan pengaruh para tokoh masyarakat dalam hal ini para kiyai NU dalam konteks politik kedaerahan, juga tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan konteks politik Nasional.¹⁴

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saepulah dengan penelitian ini adalah mengenai peran politik NU ketika kegiatan kontestasi politik berlangsung, baik itu di daerah maupun Nasional.

Adapun perbedaan utama penelitian yang dilakukan oleh Saepulah dengan penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini tidak membahas mengenai peran politik identitas keagamaan saja, akan tetapi membahas pula mengenai peran politik NU dalam menjaga keutuhan bangsa serta menjadi pilar moderasi beragama. Penelitian ini, dengan kata lain, berupaya menyuguhkan bagaimana etika politik NU dan perjalanan sejarah politik NU untuk keberlangsungan bangsa Indonesia agar tetap berbeda-beda tapi tetap satu.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Naufal Riza, dengan tema "*Eksistensi Nahdlatul Ulama*

¹⁴ Saepulah, 2021, "*Politik Identitas Keagamaan Warga Nahdlatul Ulama (NU)*", (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)

Dalam Dunia Politik Pada Masa Transisi Kekuasaan Di Indonesia (1998-2004)”, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012). Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa peralihan kekuasaan, khususnya setelah jatuhnya rezim Orde Baru menuju era Reformasi. Bagi peneliti, masa transisi ini telah memberikan perubahan yang sangat fundamental pada wajah perpolitikan di Indonesia.¹⁵

Pada masa ini, banyak sekali partai-partai politik yang tampil kepermukaan dengan basis ideologi tertentu, baik itu yang bersumber dari ideologi agama atau ideologi lainnya. Fenomena yang menunjukkan kecenderungan baru dalam wajah politik Indonesia ini, juga melibatkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, terutama dengan mendirikan partai politik yang dianggap sebagai representasi dari NU itu sendiri, yakni partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Secara khusus penelitian ini berusaha menyuguhkan bagaimana peran NU dalam dunia perpolitikan Indonesia, terutama yang

¹⁵ Naufal Riza, 2012, *“Eksistensi Nahdlatul Ulama Dalam Dunia Politik Pada Masa Transisi Kekuasaan Di Indonesia (1998-2004)”*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

direpresentasikan oleh partai PKB pada masa transisi tersebut (1998-2004).¹⁶

Kesimpulan yang menarik yang dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa langkah NU membentuk PKB pada saat itu dianggap sebagai langkah yang tepat dan kongkrit untuk merespon kebutuhan masyarakat akan kepastian politik yang sedang tidak baik-baik saja, terlepas dari keputusan NU untuk tidak berpolitik praktis.¹⁷

Persamaan antara penelitian diatas dengan peneliti adalah pembahasan mengenai perjalanan perpolitikan NU ketika masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke era Reformasi, yang mana pada waktu tersebut banyak sekali peran-peran politik NU yang muncul dan membawa perubahan dalam wajah politik di Indonesia.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melihat keberadaan serta peran Politik NU tidak dibatasi dengan terbentuknya partai politik yang berbasis ideologi keagamaan atau ideologi ASWAJA. Penelitian ini lebih banyak akan diarahkan untuk memotret

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

perjalanan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, dan bagaimana hubungan serta peran terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia pada tahun 1994-2001, terutama peran politik NU yang dianalisis dari perspektif politik kebangsaan.

3. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Yovenska L. Man, dengan tajuk "*Urgensi Nahdlatul Ulama Dalam Pemerintahan Indonesia*", (Bengkulu; Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2018). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar mempunyai urgensi yang sangat besar dalam membangun pemerintahan di Indonesia. Peneliti juga menjelaskan bahwa NU sudah banyak memberikan kiprah yang sangat fundamental untuk kemajuan negara baik dari segi aspek sosial, pendidikan, politik, maupun sisi ekonomi. Dimana analisis yang digunakan terfokus pada seluruh aspek yang mana peran NU sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat serta berdampak baik bagi negara, Sehingga sebagai organisasi masyarakat terbesar, Nahdlatul Ulama

tentu memiliki urgensi yang sangat besar dalam membangun pemerintahan di Indonesia.¹⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai peran politik dalam segi aspek sosial, pendidikan, politik, maupun sisi ekonomi yang mana peran politik NU menjadi sangat fundamental dalam pembangunan Negara dan kemaslahatan Masyarakat.

Perbedaan penelitian Yovenska L. Man dengan penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini tidak membahas semua sisi aspek, akan tetapi penelitian ini akan membahas mengenai aspek etika dan peran politik NU pada tahun 1994-2001 dengan menggunakan analisis yang terfokus pada politik kebangsaan yang telah dicetuskan dan disosialisasikan oleh NU sendiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk membatasi permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Maka dari itu, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan

¹⁸ Yovenska L. Man, 2018, "*Urgensi Nahdlatul Ulama Dalam Pemerintahan Indonesia*", (Bengkulu; Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam)

dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Dalam penulisan sejarah, dikenal beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan. Batasan-batasan ini terdiri dari segi, temporal (waktu), spasial (tempat), dan tematis.¹⁹

Dari segi temporal, skripsi ini membahas mengenai etika dan peran politik Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1994-2001. Pada tahun 1994 terjadi peristiwa Mukhtamar NU ke-29 yang mana ada keterlibatan interpersi politik dari pemerintah kepada sebagian warga NU agar K.H. Abdurrahman Wahid tidak terpilih menjadi Ketua PBNU. kemudian pada tahun 2001 terdapat peristiwa politik, yang mana K.H. Abdurrahman Wahid resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-4 menggantikan Presiden B.J Habibi, dan menjadi peristiwa penting dalam peran politik NU di Indonesia.

Dari segi spasial, fokus penelitian ini hanya berfokus pada organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia, karena awal mula lahirnya NU berawal dari perjuangan para kiai yang berada di Indonesia. Selanjutnya dari segi tematis, penulisan ini dibatasi pada etika dan peran politik Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1994-2001.

¹⁹ <https://www.Sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/> (Diakses pada tanggal 11 Maret 2023)

F. Landasan Teori

Dalam kajian sejarah ini penulis memberikan gambaran secara singkat landasan teori yang menjadi bahan pijakan serta sandaran dalam membicarakan terkait Etika dan Peran Politik Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 1994-2001.

Menurut Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa Etika merupakan Ilmu atau refleksi yang berkaitan erat dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Adapun jika dalam arti yang lebih luas etika diartikan sebagai keseluruhan penelitian dan norma yang dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk menentukan serta mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.²⁰

Adapun dalam agama islam, etika pada dasarnya tidak pernah memisahkan antara nilai-nilai etis atau moral dengan nilai-nilai hukum. Keduanya diatur pada Syari'ah Islam dan dikelompokkan dalam lima macam kategori: perintah keras (*Wajib*), perintah lunak (*Sunnah*), larangan keras (*Haram*), larangan lunak (*Makruh*), dan kebebasan (*Mubah*). Masing-masing dari kelima kategori tersebut diberi sanksi berupa hukuman tertentu yang dapat dijatuhkan di dunia dan imbalan oleh Allah di akhirat kelak berupa pahala atau dosa besar maupun kecil.²¹

²⁰ Gunadi Ipel, 2017, "*Konsep Etika Menurut Franz Magnis-Suseno*", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh), Hal. 47

²¹ Ibid, Hal.26

Menurut Prof. Miriam Budiardjo Politik adalah sebuah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik.²² Dalam mencapai kehidupan yang baik ini perlu adanya usaha berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. akan tetapi menurut filsuf Socrates, ia mendefinisikan politik adalah sebuah cara untuk menggapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Ini disebabkan keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia.²³

Dalam Islam menyebutkan politik dengan istilah *syiasah*. Adapun arti dan maksud dari kata “*syiasah*” itu sendiri adalah mengatur segala urusan umat. Maka dari itu Islam sangat menekankan pentingnya *Syiasah* ini.²⁴ menurut NU sendiri politik adalah sebuah cara untuk memperkuat kebangsaan dan kerakyatan. Konsep politik ini menjadi pedoman penting bagi warga NU, bahkan KH. Sahal Mahfudz menyebutkan bahwa kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik yang masih dalam jalur *Fiqh Syiasah*.²⁵

²² Budiardjo Miriam, 2017 “*Dasar-Dasar Politik*”, (Gramedia pustaka utama, Jakarta), Hal.13

²³ Ramlan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, (Grasindo, Jakarta, Agustus 2018), Hal.30

²⁴ Zainullah, “*Poltik Dalam Islam*”, (Artikel alkhairat, September 2018)

²⁵ Fathoni, “*Politik NU: Politik Kebangsaan dan Politik Kerakyatan*”, (nu.or.id, 20 Juni 2021), <https://www.nu.or.id/post/read/104034/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik-kerakyatan> (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022)

Istilah bangsa menurut Joseph Stalin yaitu suatu bangsa yang terbentuk secara historis, merupakan komunitas rakyat yang stabil dan terbentuk atas dasar kesamaan bahasa, wilayah, ekonomi, serta perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya bersama.²⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi bangsa ialah kumpulan manusia yang bisaanya terikat karena kesatuan bahasa, kebudayaan dan menempati satu wilayah tertentu.

Pengertian Negara Menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu.²⁷ Adapun Menurut Prof. Dr. Djokosoetono, SH Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.²⁸ Jika dikaitkan dengan definisi di atas maka yang dimaksud peran politik Nahdlatul Ulama dalam berbangsa dan bernegara adalah menemukan fakta-fakta mengenai kontribusi NU terhadap menjaga keutuhan bangsa dan negara dari segi gerakan politik.

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak

²⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-bangsa-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

²⁷ Prof. Miriam Budiardjo, Op.Cit, Hal.17

²⁸ <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488> (Diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

dalam oposisi soisal. Dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.²⁹ Peran juga sering diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (Norma-norma, harapan, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing untuk mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang mengikat seseorang maupun organisasi untuk melakukan kegiatan berdasarkan tujuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan beberapa teori di atas, peneliti mencoba mencari pengaruh serta peran politik NU dalam menjaga kesatuan bangsa dan negara. Karena peneliti berasumsi bahwa kemerdekaan Indonesia dan kesetabilan bangsa tak lepas dari peran organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, terkhusus Nahdlatul Ulama yang memang sudah mempunyai perjalanan historis yang sangat panjang dalam menjaga keutuhan bangsa, serta NU juga menjadi basis gerakan warga *Nahdiyyin* yang ada di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran politik NU dalam

²⁹ Joore. M Ruru, “*peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon*”, (jurnal Administrasi Publik, Vol.04, No.048), Hal.2

berbangsa dan bernegara mempunyai kontribusi besar terhadap keutuhan negara.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara guna mendapatkan data dengan kegunaan tertentu yang menggunakan cara ilmiah meliputi rasional, empiris, dan sistematis.³⁰ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*library reseach*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi serta berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Prof. M. E. Winarno, Metodologi Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan cermat. Sedangkan menurut Muhammad Nasir, memahami metode penelitian merupakan metode yang paling penting yang harus dilakukan oleh para peneliti agar dapat mencapai sebuah tujuan dan dapat menemukan jawaban sebagai penyelesaian masalah yang akan diajukan.³¹

Sumber tertulis memiliki berbagai macam informasi didalamnya, seorang sejarawan yang baik dituntut untuk dapat

³⁰ Sugiono, “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta 2016), Hal.2

³¹ Eviatasari Ika, ” *Pengertian Metode Penelitian*”, (Ruang Guru, 03 Februari 2020), <https://ruangguru.co/pengertian-metode-penelitian/> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

mencari informasi yang sedetail mungkin terkait dengan peristiwa yang ingin ia angkat disalah satu bentuk tulisannya untuk kemudian dapat ditilik dan dipakai.³² Jenis data atau sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan lain-lain. Data primer merujuk kepada buku-buku yang memuat seputar perpolitikan di tubuh NU. Data sekunder, berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku atau artikel, yang mengandung pembahasan peran politik Nahdlatul Ulama yang di tulis oleh sarjana, peneliti, dan cendekiawan. Data yang lain ialah seperti ensiklopedia, internet, jurnal, dan lain-lain. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu tipe pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah.

Seperti yang diungkapkan oleh kuntowijoyo bahwa penelitian sejarah mempunyai lima tahapan penelitian diantaranya yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.³³

1. Pemilihan Topik

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan wilayah kajian Sejarah Islam di Indonesia dan mengambil topik Pasca Kolonial. Selanjutnya penulis memilih

³² Aditia Muara Padiatra, 2020, "*Ilmu Sejarah: Metode dan Praktek*", (Gersik, JSI Press). Hal.46

³³ Kuntowijoyo, "*Pengantar Ilmu Sejarah*", (Yogyakarta, Tiara Wacana, Juli 2013), Hal.69

etika dan peran politik Nahdlatul Ulama sebagai pembahasan.³⁴

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Langkah awal dalam pengumpulan data. Awal mula peneliti mengumpulkan data itu dengan cara membaca terlebih dahulu literature terdahulu mengenai topic penelitian agar bisa mempermudah dalam pengumpulan data. Peneliti juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian peneliti dapat menjaring sumber data sebanyak mungkin dan bisa menjaring jejak-jejak sejarah yang ditemukannya.³⁵

Adapun dalam mencari sumber atau literatur, peneliti melakukan pencarian di beberapa tempat yaitu di Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Perpustakaan 400 Kota Cirebon, Perpustakaan Sumber, Perpustakaan Pascasarjana, dan Perpustakaan Ma'arif NU Kabupaten Cirebon. Selain mencari ke beberapa Perpustakaan yang ada di Cirebon, penulis juga mencari sumber dan literatur di Internet.

³⁴ Ibid. Hal.70

³⁵ Ibid, Hal.72

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber-sumber di temukan, tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap berbagai data yang telah terkumpul, tujuan menganalisis data adalah untuk menemukan dan memastikan keabsahan dari sebuah data. Dalam hal ini yang harus di uji adalah keabsahan dari keaslian sumber (*otentitas*) yang dilakukan melalui kritik eksternal dan keabsahan tentang kesahihan sumber (*kredibilitas*) yang ditelusuri melalui kritik internal.³⁶ Dalam hal ini peneliti harus melakukan pengujian asli dan tidaknya sumber, yaitu dengan menyeleksi dari berbagai segi fisik dari sumber yang didapatkan. Menurut Nugroho Notosusanto dalam tulisan Sulasman menegaskan bahwa:

“Setiap sumber mempunyai aspek intern dan ekstern. Aspek ekstern bersangkutan dengan apakah sumber itu memang sumber, artinya menjadi sumber yang dibutuhkan ? Kritik ekstern atau luar dilakukan untuk meneliti keaslian sumber tersebut valid, asli atau tiruan ? Sumber tersebut utuh atau dalam artian belum berubah, baik bentuk maupun isinya. Aspek intern berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan atau tidak. Kritik intern atau kritik dalam dilakukan untuk menyelidiki sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian.

³⁶ Ibid, Hal. 77

*Tahapan ini menjadi ukuran objektivitas penulis dalam mengolaborasi data atau sumber yang telah diperolehnya, dan tentu mengedepankan prioritas”.*³⁷

4. Interpretasi

Selanjutnya pada tahap interpretasi, peneliti akan melakukan penafsiran dari data-data yang telah disajikan untuk melihat hubungan antara data satu dengan data yang lainnya. Peneliti melakukan interpretasi dengan cara membedah sumber yang telah di verifikasi. Tujuan utamanya dalam melakukan interpretasi ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi-informasi dari sumber dan literatur yang di sajikan, sehingga akan mempermudah peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya.³⁸

5. Penulisan (Historiografi)

Tahap ini adalah tahap terakhir, penulis akan menyajikan hasil dan kesimpulan yang didapat dari proses penelitian dalam bentuk karya tulis yang sistematis, karena menurut Kuntowijoyo dalam kesimpulannya penulis dapat mengemukakan *generalization* dari yang telah

³⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.101-102

³⁸ Kuntowijoyo, Op.Cit, Hal.78

penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya dan *sosial significance* penelitian itu.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini penulis akan menyajikan pembahasan-pembahasan yang terbagi kedalam lima bab sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan. Pada BAB ini penulis akan menyajikan terlebih dahulu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada BAB ini akan penulis bahas terlebih dahulu sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama dengan pokok pembahasan Nahdlatul Ulama sebagai sentrum gerakan keagamaan dan sentrum gerakan politik.

BAB III. Pada BAB ini penulis akan membahas mengenai etika politil Nahdlatul Ulama dengan pokok bahasan pengertian etika politik serta etika politik perspektif Nahdlatul Ulama.

BAB IV. Selanjutnya pada BAB ini akan membahas mengenai peran politik Nahdlatul Ulama pada tahun 1994-2001 dengan pokok bahasan sikap politik Nahdlatul Ulama serta kesuksesan politik Nahdlatul Ulama.

³⁹ Ibid, Hal.81

BAB V. Pada BAB ini akan berisi penutup dan kesimpulan serta saran-saran penulis untuk penelitian lebih lanjut.

